

Kebijakan Moneter Dan Perkembangan Ekonomi: Perspektif Islam

Aulia Fitri Anggraini

Institut Agama Islam Negeri Metro

Dinda Salsabila Sarly

Institut Agama Islam Negeri Metro

Wahyu Rama Wirayuda

Institut Agama Islam Negeri Metro

Alamat: Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota Metro,
Lampung
Korespondensi penulis: auliafitri157@email.com

Abstract. The government's role in Islamic economics is very significant, not only in regulating public aspects in accordance with Islamic principles, but also in financial matters such as managing basic needs, creating jobs, and maintaining the stability of the value of money. Public authorities need appropriate arrangements to steer the economy in the desired direction. One of the strategies used is financial regulation, which aims to control the money supply so that economic growth is stable, the cost of living is affordable, and jobs are available. This research aims to explore how the financial approach works from an Islamic perspective in depth. In the context of Islamic economics, the task of public authorities is to ensure that Islamic principles apply in terms of free income, interest-free economy, and money management in accordance with Islamic principles. Financial regulatory instruments also go beyond the use of open markets and custody of money, including in terms of distribution of credit, proportion of advances, and benefits in accordance with Islamic rules. This journal explores the relationship between monetary policy and economic development from an Islamic perspective. The focus is on the government's role in regulating monetary policy to achieve stable and sustainable economic growth in accordance with Islamic principles. The discussion includes financial management strategies that include controlling the money supply, stability of the value of money, and development of an interest-free economy. By considering the basis of free income in Islamic economics, this journal also highlights monetary policy instruments that are in accordance with Islamic values, such as credit distribution and benefit proportions that follow Islamic rules. This research aims to provide in-depth insight into how monetary policy can be implemented effectively in the context of Islamic economics, as well as implications and suggestions for sustainable economic development from an Islamic perspective..

Keywords: Monetary Policy, Economic Development, Islamic Perspective

Abstrak. Peran pemerintah dalam ekonomi Islam sangat signifikan, tidak hanya dalam mengatur aspek-aspek publik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga dalam masalah keuangan seperti pengelolaan kebutuhan pokok, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas nilai uang. Pemerintah membutuhkan pengaturan yang tepat untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang diinginkan. Salah satu strategi yang digunakan adalah pengaturan keuangan, yang bertujuan untuk mengendalikan suplai uang agar pertumbuhan ekonomi stabil, biaya hidup terjangkau, dan lapangan kerja tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali cara kerja pendekatan keuangan dalam perspektif Islam secara mendalam. Dalam konteks ekonomi Islam, tugas pemerintah adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam berlaku dalam hal pendapatan bebas, ekonomi tanpa bunga, dan pengelolaan uang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Instrumen pengaturan keuangan juga melampaui pemanfaatan pasar terbuka dan penahanan uang, termasuk dalam hal pembagian kredit, proporsi uang muka, dan manfaat yang sesuai dengan aturan Islam. Jurnal ini mengeksplorasi hubungan antara kebijakan moneter dan perkembangan ekonomi dalam perspektif Islam. Fokusnya adalah pada peran pemerintah dalam mengatur kebijakan moneter untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pembahasan meliputi strategi pengaturan keuangan yang mencakup kontrol pasokan uang, stabilitas nilai uang, dan pembangunan ekonomi tanpa bunga. Dengan mempertimbangkan landasan pendapatan bebas dalam ekonomi Islam, jurnal ini juga menyoroti instrumen-instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti pembagian kredit dan proporsi manfaat yang mengikuti aturan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan moneter dapat diterapkan secara efektif

Received: Mei 01, 2024; Accepted: Juni 04, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Aulia Fitri Anggraini, auliafitri157@email.com

dalam konteks ekonomi Islam, serta implikasi dan saran bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dalam perspektif Islam.

Kata kunci: Kebijakan Moneter, Pertumbuhan Ekonomi, Perspektif Islam

LATAR BELAKANG

Sistem moneter atau sistem keuangan yang pada dasarnya menyajikan aktivitas keuangan untuk mempublikasikan komponen-komponen, mulai dari aktivitas produksi, distribusi, dan pemanfaatan, hampir ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, bahkan di negara-negara yang memiliki sistem moneter liberal dan wirausaha. Mediasi pemerintah dalam kerangka moneter perekonomian yang tidak terbatas ini tidak lepas dari kekecewaan komponen pasar terhadap kinerja yang baik dan sempurna sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan kekecewaan pasar. Hal ini merupakan ranah pemerintah untuk melakukan mediasi dalam perekonomian untuk menempatkan perekonomian pada posisi yang benar dan diinginkan. Meskipun dalam kerangka keuangan ekonomi yang tidak diatur ini, setiap orang diperbolehkan untuk membeli barang dagangan yang mereka perlukan dan memilikinya, setiap orang diperbolehkan untuk menjual tenaga kerja dan produk apa pun yang mereka miliki selama masih ada minat terhadap barang tersebut, mengingat fakta bahwa tanpa permintaan, produk-produk ini tidak akan pernah bisa dikirimkan, setiap orang diperbolehkan menggunakan tenaga kerja dan produk yang mereka miliki dalam perekonomian untuk memperoleh manfaat sebanyak yang mereka bisa dan setiap orang harus bertindak bijaksana dalam setiap tindakan moneter, sementara pemerintah hanya seorang fasilitator yang baik dan tidak boleh menengahi atau ikut campur dalam pasar yang serius dan tidak ada hambatan. Meski begitu, sebenarnya pemerintah kerap melakukan mediasi ketika melihat kekecewaan pasar.

Dalam sudut pandang moneter Islam, tugas pemerintah sangatlah penting dan fundamental, terutama dalam hal pembentukan lapangan kerja, penurunan tingkat kemiskinan dan pembangunan keuangan yang terkendali serta pencapaian pertumbuhan moneter dan peningkatan harapan akan kenyamanan sehari-hari. Pemerintah harus dapat menjamin bahwa dampak pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang yang bermodal, namun juga harus diapresiasi oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan standar dan nilai-nilai Islam di seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk yang berhubungan dengan perekonomian, dengan melakukan upaya-upaya tertentu dan pengaturan yang cermat. Di bidang moneter, pemerintah harus menjamin kebutuhan hidup

yang penting bagi setiap penduduknya, membuka pintu potensi bisnis, bekerja dengan izin masuk ke setiap aset keuangan, menjamin pelaksanaan standar dan nilai-nilai Islam dalam menetapkan biaya dan melaksanakan keuangan. Selanjutnya, pemerintah dalam perekonomian Islam harus mengambil peran positif dan besar dalam pengembangan keuangan.

Segala sesuatu yang disebutkan di atas tentunya memerlukan pendekatan keuangan yang tepat dari pihak pemerintah. Ada dua pendekatan utama dalam perekonomian yang disebut strategi keuangan dan uang. Strategi keuangan adalah strategi yang dilakukan untuk uang tunai (uang tunai yang beredar di mata masyarakat), pasokan uang tunai saat ini, ketergantungan nilai uang tunai dan arah tujuan penggunaan uang tunai dengan menggunakan instrumen atau instrumen terkait uang yang sesuai sehingga tujuan dapat tercapai. Strategi keuangan adalah suatu strategi yang digunakan untuk mempersiapkan langkah-langkah memperoleh pendapatan negara, termasuk membebaskan pendapatan, serta mengendalikan arah strategi moneter dan mengendalikan seberapa besar penggunaan dan pengeluaran pemerintah dengan menggunakan perangkat moneter, sehingga sasaran strategi dapat tercapai. Dalam eksplorasi ini, peneliti hanya menyoroti pembicaraan tentang strategi terkait uang dan saran-sarannya untuk pengembangan keuangan menurut sudut pandang Islam.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan cara subjektif untuk menyelidiki hubungan antara strategi keuangan dan perkembangan moneter menurut sudut pandang Islam. Metodologi subjektif dipilih dengan alasan bahwa metodologi tersebut memungkinkan pemeriksaan pemahaman, pemahaman dan praktik dari atas ke bawah sehubungan dengan kerumitan keuangan dan kualitas Islam. Teknik pemeriksaan ini akan memberikan pengetahuan dari atas ke bawah mengenai hubungan antara strategi terkait uang dan pembangunan moneter menurut sudut pandang Islam, serta konsekuensinya dalam merencanakan pendekatan keuangan yang lebih terpelihara dan komprehensif.

¹ Boediono, *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis*. (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 1999)

KAJIAN TEORITIS

A. Kebijakan Moneter

Strategi terkait uang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh kekuatan terkait uang, umumnya bank nasional, untuk mengendalikan pasokan uang tunai, biaya pinjaman, dan aktivitas moneter lainnya dalam suatu perekonomian. Tujuan utama dari strategi terkait uang adalah untuk mencapai keamanan biaya, pertumbuhan moneter yang disesuaikan, dan kekuatan kerangka moneter. Berikut ini beberapa instrumen pengaturan keuangan yang umum digunakan:

1. **Kontrol Penawaran Uang:** Bank sentral dapat mengatur penawaran uang dalam perekonomian dengan mengeluarkan atau menarik uang dari sirkulasi. Penawaran uang dapat diatur melalui kebijakan pembelian atau penjualan surat berharga pemerintah atau intervensi langsung dalam pasar uang.
2. **Pengaturan Suku Bunga:** Bank sentral dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dengan mengubah suku bunga acuan atau suku bunga resmi. Menaikkan suku bunga cenderung mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi, yang dapat membantu mengendalikan inflasi. Sebaliknya, penurunan suku bunga dapat merangsang aktivitas ekonomi dan pertumbuhan.
3. **Operasi Pasar Terbuka:** Ini adalah kebijakan di mana bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah di pasar terbuka untuk memengaruhi likuiditas dan suku bunga. Jika bank sentral membeli surat berharga, penawaran uang meningkat, sementara penjualan surat berharga dapat menurunkan penawaran uang.
4. **Persyaratan Cadangan:** Bank sentral dapat menetapkan persyaratan cadangan, yaitu persentase dari deposito yang harus dipertahankan oleh bank sebagai cadangan tunai. Menurunkan persyaratan cadangan dapat meningkatkan likuiditas dan mendukung pertumbuhan kredit, sementara meningkatkannya dapat mengurangi likuiditas dan membatasi pertumbuhan kredit.
5. **Kebijakan Komunikasi:** Bank sentral juga dapat menggunakan kebijakan komunikasi untuk mempengaruhi ekspektasi pasar dan perilaku ekonomi. Pernyataan resmi, pidato, atau konferensi pers dari pejabat bank sentral dapat memberikan sinyal tentang arah kebijakan moneter di masa depan.

Strategi keuangan secara mendasar dapat mempengaruhi perekonomian, termasuk tingkat ekspansi, biaya pinjaman, spekulasi, pemanfaatan, dan perkembangan moneter secara umum. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi keuangan yang sukses dan hati-hati sangat penting dalam menjaga soliditas moneter suatu negara.²

B. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan keuangan Mengacu pada perluasan yang terus-menerus dalam penciptaan tenaga kerja dan produk di suatu negara atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi biasanya diperkirakan menggunakan PDB (Produk Domestik Bruto) atau Pendapatan Publik Bruto (GNP), yang mencatat total nilai penciptaan tenaga kerja dan produk dalam jangka waktu, biasanya satu tahun.

Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi:

1. **Investasi:** Investasi yang tinggi dalam infrastruktur, teknologi, dan modal manusia dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
2. **Konsumsi:** Konsumsi rumah tangga yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa.
3. **Inovasi dan Teknologi:** Kemajuan dalam teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menciptakan sektor-sektor baru dalam ekonomi, yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
4. **Kebijakan Fiskal dan Moneter:** Kebijakan pemerintah dalam hal pengeluaran publik, pajak, subsidi, dan kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga dan penawaran uang dapat memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.
5. **Perdagangan Internasional:** Keterlibatan dalam perdagangan internasional dapat memperluas pasar untuk barang dan jasa domestik, memungkinkan akses ke sumber daya dan teknologi asing, dan meningkatkan efisiensi melalui spesialisasi.
6. **Kestabilan Politik dan Sosial:** Lingkungan politik dan sosial yang stabil dapat menciptakan kepastian bagi pelaku ekonomi, mendorong investasi, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

² Chapra. M. Umer, "Toward a Just Monetary System". (Leicester: The Islamic Foundation, 1985)

7. **Infrastruktur:** Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi, energi, dan komunikasi yang berkualitas, dapat meningkatkan efisiensi produksi dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan tujuan yang diinginkan banyak negara karena dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun perlu diingat bahwa pertumbuhan ekonomi juga harus diimbangi dengan kelestarian lingkungan dan inklusi sosial, serta mengakomodasi kebutuhan generasi mendatang.³

C. Kebijakan Moneter dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Dalam sudut pandang Islam, pendekatan keuangan dan pengembangan moneter diperintahkan untuk mencapai tujuan keuangan yang sesuai dengan standar syariah. Beberapa aturan utama yang membentuk cara Islam dalam menangani strategi keuangan dan pembangunan moneter termasuk:

1. **Keadilan dan Keseimbangan:** Prinsip keadilan dan keseimbangan sangat penting dalam Islam, termasuk dalam konteks kebijakan moneter. Kebijakan moneter Islam harus memastikan bahwa distribusi kekayaan dan akses ke sumber daya keuangan dilakukan secara adil dan seimbang.
2. **Larangan Riba:** Dalam Islam, riba atau bunga dianggap sebagai praktik yang tidak etis dan dilarang. Oleh karena itu, kebijakan moneter dalam perspektif Islam harus memastikan penggunaan instrumen keuangan yang bebas dari riba, seperti *profit-sharing* dan *mudharabah* (bagi hasil), serta mempromosikan transaksi yang adil dan berkeadilan.
3. **Stabilitas Harga:** Stabilitas harga juga menjadi tujuan utama dalam kebijakan moneter Islam, dengan tujuan mencegah inflasi yang merugikan masyarakat dan merusak daya beli uang. Namun, pendekatan Islam juga memperhatikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan memastikan bahwa stabilitas harga tidak dicapai dengan merugikan golongan yang lebih lemah.
4. **Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan:** Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya tentang peningkatan jumlah

³ Chapra. M. Umer, "Money and Banking in an Islamic Economics". Dalam Muhammad Ariff (ed.), *Monetary and Fiscal Economic of Islam*. (Jeddah Center for Research in Islamic Economics. 1982)

produksi atau pendapatan, tetapi juga tentang menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Kebijakan moneter harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial.

5. Pengelolaan Risiko dan Stabilitas Sistem Keuangan: Islam mengajarkan pentingnya pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Bank sentral dalam sistem keuangan Islam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik-praktik keuangan sesuai dengan prinsip syariah, serta mengelola risiko dan stabilitas sistem keuangan dengan baik.

Dengan berfokus pada standar-standar ini, pengaturan keuangan dalam sudut pandang Islam diharapkan dapat mencapai kesehatan keuangan yang terjaga, distribusi kekayaan yang adil, dan pada umumnya bantuan pemerintah yang ramah, sesuai dengan hikmah dan manfaat dari agama Islam.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melanjutkan ke arah tujuan pendekatan yang berhubungan dengan uang, ada baiknya tujuan pengaturan moneter dari sudut pandang keuangan Islam. Pertama-tama, tujuan pendekatan keuangan yang paling penting dan utama adalah untuk melestarikan Islam di setiap aspek kehidupan individu di negara ini dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia dan melindungi negara. Kedua, membantu mencapai tingkat pembangunan dan perbaikan moneter yang lebih tinggi yang berperan penting dalam mencapai bantuan pemerintah dan keberhasilan finansial individu serta memahami komitmen negara, termasuk⁵:

Pertama, menjamin pertumbuhan ekonomi bagi individu dengan memberikan peluang bisnis yang berharga, memenuhi kebutuhan penting kehidupan setiap orang melalui pakaian, makanan dan tempat berlindung serta pendidikan dan kesejahteraan. Kedua, melaksanakan disiplin dan organisasi yang berorientasi pada bantuan keuangan pemerintah negara, mengingat mempertinggi peran lembaga Hisbah bagi perekonomian. Ketiga, karena tujuan strategi moneter yang kedua adalah untuk

⁴ Jhingan, M.L. *The Economics of Development and planning*. Ter. D. Guritno, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2000)

⁵ Mansur, Ahmad. *Potensi Tabungan, Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Dalam *Jurnal Keislaman Program Pasca Sarjana "AKADEMIKA" IAIN Sunan Ampel Surabaya*. Vol. 13, No. 1, September, 2003

meningkatkan pemanfaatan aset keuangan, baik SDM maupun aset reguler. Keempat, menciptakan lingkungan keuangan yang menguntungkan, khususnya lingkungan bagi kegiatan usaha dan penciptaan yang berbasis perdagangan dan pintu terbuka yang bermanfaat agar kegiatan keuangan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain empat strategi keuangan yang disebutkan di atas, ada dua pendekatan tambahan yang utama dan berjangka panjang dalam menghadapi perekonomian bangsa. Pengakuannya mungkin memerlukan langkah-langkah yang berbeda dalam hal tingkat signifikansi finansial, perluasan dan waktu pelaksanaannya. Kedua pendekatan keuangan ini adalah pengaturan moneter dan keuangan, dengan kedua strategi ini, Negara dapat memvariasikan substansi yang mewakili perekonomian masa depan yang berhubungan dengan pembangunan keuangan, distribusi gaji dan kekayaan yang adil dan tidak memihak, peningkatan derajat bisnis, pengendalian ekspansi. dan beberapa target keuangan eksplisit, yang pastinya terdapat fokus-fokus yang lebih signifikan dan relevan untuk dijadikan fokus dibandingkan target-target lainnya. Selain itu, kedua strategi keuangan dan keuangan ini dapat digunakan untuk saling melengkapi dalam mencapai fokus tertentu dalam perekonomian. Strategi moneter mungkin lebih berhasil untuk mengelola permasalahan tertentu dan melacak pengaturan, serta sebaliknya, namun keduanya juga dapat digunakan untuk saling melengkapi guna mencapai target keuangan tertentu.

Meskipun demikian, titik fokus dari penelitian ini adalah pada pendekatan keuangan dan saran-sarannya untuk kemajuan keuangan dari sudut pandang keuangan Islam. Pengertian dan pengertian Pendekatan Keuangan adalah aktivitas pemerintah (kekuasaan terkait uang) untuk mempengaruhi apa yang terjadi melalui pasar mata uang atau dengan mempengaruhi proses penciptaan uang tunai. Misalnya, mempengaruhi pasokan uang tunai atau cash supply.⁶

$$n \text{ Ms} \rightarrow r \rightarrow I \rightarrow Z \rightarrow P.Q$$

$$n \text{ r} = \text{bunga}$$

$$n \text{ I} = \text{investasi}$$

⁶ Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan. Yogyakarta: Magistra Insania Press.

n Z = permintaan agregat

n P.Q = Tingkat harga (P) & Pendapatan atau GDP riil

Dalam kasus di atas, pasokan uang tunai akan mempengaruhi biaya pinjaman, biaya pendanaan akan mempengaruhi tingkat usaha, tingkat spekulasi akan mempengaruhi tingkat bunga total dan tingkat bunga total akan mempengaruhi tingkat biaya dan gaji atau PDB asli. . Jika pasokan uang tunai dapat menurunkan biaya pendanaan, penurunan biaya pinjaman akan mendukung perluasan usaha, perluasan spekulasi pasti akan meningkatkan produksi dan tingkat hasil. Hal ini sebenarnya berarti telah terjadi peningkatan gaji yang berarti perekonomian telah berkembang. Arti lain dari strategi keuangan adalah suatu pengaturan yang menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan uang yang berhubungan dengan (1), pengendalian landasan moneter; (2), transaksi dinamis dan akuisisi kertas dalam jumlah besar oleh spesialis terkait uang berdampak pada perubahan jumlah uang tunai yang tersedia untuk digunakan; (3), kesepakatan laten dan perolehan perlindungan untuk mempertahankan struktur biaya pinjaman tertentu, berbagi soliditas biaya, atau memenuhi komitmen dan tanggung jawab spesifik yang berbeda.

Arti lain dari strategi keuangan adalah bahwa strategi keuangan merupakan suatu alat administrasi dalam menyelesaikan penyesuaian ekonomi makro yang berhubungan dengan pengendalian ekspansi, perluasan kerja, mengupayakan keselarasan antar angsuran dan menjaga keseimbangan angsuran, pengentasan kemelaratan dan pertumbuhan moneter, tentunya mendukung pembangunan moneter. atau pengembangan moneter praktis. Tujuan utama dari pengaturan terkait uang adalah untuk mendorong perekonomian negara mencapai kesehatan dan pembangunan keuangan yang tinggi dalam penciptaan tenaga kerja dan produk.

Sebuah negara yang nyaman dan memiliki banyak pekerjaan dan barang dalam jangka panjang adalah awal dari perekonomian yang tak tertandingi dan akan melibatkan negara-negaranya untuk menghargai pencapaian yang berhubungan dengan uang. Hasil lokal yang tinggi berarti mempertahankan angkatan kerja yang tinggi juga. Terlepas dari hal-hal yang disebutkan di atas, inti dari teknik yang berhubungan dengan uang tunai adalah menjaga tingkat penyuluhan tetap rendah dan menjaga biaya tetap stabil. tingkat kebutuhan yang rendah atau menyelesaikan pekerjaan penuh, dan menjaga keseimbangan porsi dan neraca perdagangan serta kondisi perdagangan.

Pengaturan terkait uang, selain mendukung strategi keuangan yang disebutkan di atas, menurut sudut pandang Islam, target khusus dari pendekatan terkait uang adalah sebagai berikut:

1. Meliputi peningkatan pembangunan keuangan yang stabil dengan penyederhanaan penggunaan aset keuangan, baik SDM maupun aset tetap.
2. Memberikan distribusi gaji dan kelimpahan yang adil dan tidak memihak dalam perekonomian tanpa disparitas moneter yang tinggi.
3. Mengendalikan terjadinya siklus tinggi dalam perekonomian yang dapat berdampak buruk terhadap pergerakan keuangan dan menyebabkan pelaku moneter menanggung akibatnya.
4. Mempertahankan sifat-sifat Islami dan menerapkan standar-standar Islam dengan melakukan upaya preventif terhadap praktik-praktik yang dilarang oleh syariah, misalnya pertukaran moneter berbasis bunga dan menawarkan bantuan untuk aktivitas keuangan yang dianggap penting dengan memberikan kebutuhan yang tinggi dan juga sebaliknya. .
5. Menjaga keseimbangan dalam neraca pembayaran eksternal.

Sasaran khusus terkait uang diatas sama dengan sasaran khusus pengaturan keuangan. Yang pasti, strategi keuangan dan yang berhubungan dengan uang adalah dua pengaturan pemerintah yang bersifat elektif dalam mengkoordinasikan perekonomian suatu negara, jelas menuju pembangunan moneter yang berkelanjutan dan mencapai keberhasilan dan kesejahteraan moneter masyarakat, mencapai distribusi gaji dan kekayaan yang adil dan tidak memihak serta menjamin kebutuhan-kebutuhan penting masyarakat..

Instrumen Kebijakan Moneter dalam Perspektif Islam

Kualitas mendasar dari strategi terkait uang dalam perekonomian Islam adalah dikeluarkannya dari kerangka moneter oleh kekuatan finansial. Kurangnya kerangka bunga, yang pada kenyataannya merupakan instrumen penting dalam strategi keuangan, membuat para ahli keuangan Islam bergantung pada instrumen yang berbeda dalam melakukan strategi keuangannya. Beberapa ahli keuangan Islam memberikan instrument pilihan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan strategi terkait keuangan, misalnya proporsi pembagian manfaat, proporsi pinjaman, proporsi penyimpanan permintaan, proporsi negosiasi ulang, dan

tugas pasar terbuka. Instrumen atau perangkat utama pendekatan keuangan adalah sebagai berikut⁷:

1. Regulasi Uang Primer (Base Money)

Persediaan uang tunai dasar harus dapat diprediksi sesuai dengan perkembangan wilayah perekonomian yang sebenarnya untuk membantu proses pembangunan keuangan dan menghindari ekspansi besar-besaran yang disebabkan oleh kelebihan pasokan uang tunai dan menghindari kemerosotan keuangan yang disebabkan oleh kekurangan uang tunai atau persediaan uang tunai

Bank Negara, sebagai agen pemerintah yang mempunyai kedudukan untuk merencanakan dan melaksanakan pendekatan terkait uang, harus menentukan besaran pengembangan kas primer yang ideal dan memutuskan jumlahnya harus dimasukkan ke dalam penyimpanan Negara tanpa dipungut biaya dan besarnya. bagian lainnya harus dimiliki oleh beberapa lembaga keuangan. misalnya bank bisnis dan bank pembangunan dengan memperhatikan standar Mudarabah.

2. Reserve Requirement atau Cash Ratio atau Cadangan Wajib

Hal ini merupakan suatu keharusan yang dipaksakan oleh bank-bank Negara kepada bank-bank besar, bank-bank bisnis dan sebagainya untuk menyimpan sebagian uang tertentu sebagai simpanan wajib di bank-bank Negara. Proporsi penanguhan yang diperlukan dapat diperluas dan dikurangi sesuai dengan tindakan yang tidak ditetapkan oleh Bank Negara untuk memasok kontrol uang tunai.

Proporsi pembagian manfaat digunakan untuk membagi manfaat antara visioner bisnis dan bank. Karena premi dibatasi dalam ekonomi Islam, maka para visioner bisnis dan bank (sebagai pendukung/pemasok modal) akan mendapatkan penawaran khusus sesuai dengan proporsi pembagian manfaat yang belum sepenuhnya ditetapkan. Apabila para pelaku bisnis memperoleh tingkat bagi hasil (benefit) yang tinggi, berarti bank akan memperoleh tingkat pembagian manfaat yang rendah, dan keadaan ini akan meningkatkan minat terhadap perekonomian yang lebih besar, begitu pula sebaliknya. Bank Negara harus mengendalikan proporsi pembagian manfaat ini untuk mengendalikan perilaku bank dalam memberikan kredit.

⁷ Sukirno, Sadono. 1999. Pengantar Teori Makro Ekonomi. 2nd ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

3. Lending Ratio atau Rasio Pinjaman

Hal ini terkait dengan jumlah uang tunai yang disimpan dalam catatan terkini, dimana bank bisnis diharapkan memberikan kredit pada pertemuan tertentu tanpa meminta pembagian keuntungan dan tanpa membebankan biaya (tanpa premi) sebagaimana al-Qord al-Hasan. Uang tunai ini adalah uang nasabah yang disimpan di bank dan dilibatkan oleh bank untuk kepentingan bank, khususnya untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa ahli keuangan Islam merekomendasikan bahwa harus ada sejumlah dana cadangan yang harus dipinjamkan kepada orang-orang miskin dan tidak punya uang seperti al-Qord al-Hasan tanpa biaya apa pun. Jika proporsi uang muka (tanpa biaya) ditetapkan tinggi, hal ini akan mengurangi pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah oleh bank-bank bisnis dan sebagainya, begitu pula sebaliknya.⁸

4. Demand Deposit Ratio atau Rasio Simpanan Rekening Giro

Ini adalah jumlah dana cadangan rekor bank bisnis yang dialihkan dan diarahkan ke pemerintah untuk digunakan guna mendukung usaha-usaha yang bermanfaat secara sosial, di mana dukungan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut tidak terbayangkan dan tidak lazim dilakukan oleh bank-bank bisnis dan sebagainya. Proporsi yang berbeda dalam situasi ini diperkirakan akan berdampak pada siklus keseimbangan keuangan dengan mengubah premis penciptaan kredit oleh bank dan batas pengeluaran pemerintah.

5. Refinance Ratio atau Rasio Pembiayaan Kembali

Alat ini dapat dijadikan alasan bagi bank-bank pemerintah untuk memberikan renegosiasi kepada bank-bank usaha dengan memberikan likuiditas (aset baru yang siap digunakan) tanpa membebankan biaya, dimana bank-bank usaha memerlukan dukungan likuiditas tersebut sampai pada persyaratan suku bunga yang paling ekstrim dalam memberikan kredit. . Uang tunai yang digunakan untuk melakukan negosiasi ulang, mencakup berapa banyak uang tunai yang dipindahkan dan diserahkan oleh bank-bank bisnis ke bank-bank pemerintah sebagai prasyarat untuk proporsi dana cadangan yang tercatat saat ini, (proporsi rekor saat ini).

6. Operasi Pasar Terbuka

Dengan penerapan kerangka premium dalam penawaran perlindungan dalam ekonomi Islam, tugas pasar terbuka dapat diselesaikan dengan memperdagangkan

⁸ Sadeq, Abul Hasan Muhammad. 1991. *Economic Development in Islam*. Malaysia: Pelanduk Publication.

perlindungan atau penawaran berdasarkan keuntungan yang diambil sesuai atau mengacu pada kecepatan pengembalian yang ditentukan oleh kekuatan terkait uang dalam memimpin pengaturan keuangan.

7. *Credit Rationing* atau Pemberian Rangsum (Pendistribusian) Kredit

Bank Negara mungkin melakukan kontrol atas arah dan ukuran kredit dan bantuan modal sehubungan dengan penyebaran keuntungan yang diberikan kepada wilayah perekonomian tertentu, dimana Bank Negara dalam keadaan saat ini mampu menjadi badan yang melakukan aktivitas pengambilan keputusan umum dan kontrol atas penyebaran kredit.

8. *moral Suasion* Atau Anjuran Moral

Instrumen-instrumen sistem moneter ini, khususnya aturan-aturan jujur yang sarat dengan pedoman dan nilai-nilai Islam, dimaksudkan untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap semua pelaku keuangan dalam perekonomian Islam dibandingkan dengan pelaku moneter dalam perekonomian konvensional, sesuai dengan sistem moneter. Filosofi moral, nasihat dan percakapan dua arah dapat memainkan peran penting dalam menentukan teknik bisnis bank dan hal-hal yang berkaitan dengan ukuran, kewajaran dan kategori kredit yang diberikan oleh bank tersebut, misalnya Murabahah atau dukungan harga⁹

Implikasi Pertumbuhan Ekonomi Dari Kebijakan Moneter

Saran atau dampak pembangunan yang timbul karena pendekatan keuangan dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi umum.

1. Dampak perkembangan keuangan yang dihasilkan dan terjadi karena pengaturan terkait uang yang dilaksanakan tanpa langkah-langkah dinamis yang berfokus pada perkembangan dan perbaikan moneter.
2. Pengaruh pembangunan keuangan yang dihasilkan dan terjadi karena pengaturan terkait uang yang dilaksanakan dengan kegiatan dinamis yang bertujuan untuk mengatasi kebimbangan moneter dan pembangunan serta pembangunan keuangan dengan menggunakan perangkat pendekatan keuangan.

⁹ Roger L. Miller dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking*. (Singapore: McGraw-Hill. Inc., 1985)

Dampak perkembangan keuangan yang timbul karena strategi terkait uang untuk kelas primer adalah pendapatan akhir sebagai instrumen pengaturan terkait uang dan sebagai biaya modal. Perintah yang merupakan permintaan dari strategi keuangan dan keuangan dalam masalah keuangan Islam adalah untuk menghapus pendapatan dalam sistem keuangan dengan mengecualikan semua jenis kegiatan perbankan yang bekerja dengan mempertimbangkan biaya pinjaman, dan mengubah semua sistem keuangan dan perbankan menjadi sistem premium. kerangka kerja gratis dan berbasis berbagi. hasil. Kerangka moneter dan perbankan dalam kaitannya dengan pembagian manfaat akan menghasilkan dua hal besar dalam pembangunan keuangan, yaitu (1), pemanfaatan aset moneter yang dapat dikontribusikan pada tingkat penggunaan penuh dan (2), kemahiran dalam distribusi aset keuangan.

Pemerintah dapat membatasi jumlah usaha dan akibatnya, spekulasi tidak dapat diselesaikan hingga tingkat penggunaan penuh atau kapasitas maksimum. Misalnya, jika biaya pinjaman terkait dengan cadangan yang diperoleh adalah $x\%$, maka latihan spekulasi dengan menggunakan aset tersebut harus dilakukan hingga tingkat Minor Effectiveness of Capital (MEC = tingkat manfaat yang diharapkan) sebesar $x\%$.¹⁰

Oleh karena itu, usaha harus dilakukan jika produktivitas modal yang dapat diabaikan lebih menonjol dibandingkan atau setara dengan laju pengembalian cicilan biaya pinjaman. Jika biaya pembiayaan $x\%$ tidak berubah dan efektivitas minimal nilai modal lebih rendah dari $x\%$, maka melanjutkan kontribusi lebih lanjut hanya akan menambah bobot angsuran bunga dibandingkan memperluas manfaat.

Selain itu, dalam kerangka perbankan atau kerangka pembagian manfaat, investasi dapat dilakukan lebih lanjut hingga nilai MEC nol. Karena manfaat akan dibagi antara pelaku bisnis dan bank berdasarkan proporsi manfaat yang telah ditentukan sebelumnya, tidak peduli apa penilaian MEC, kedua pelaku, baik pelaku bisnis maupun bank, akan mendapatkan bagi hasil positif sampai MEC mencapai kesepakatan tidak ada MEC-nya nol. Hal ini dimungkinkan karena tidak ada biaya bunga atas kredit modal. Meskipun tingkat pembayaran yang diharapkan atau MEC berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah investasi, potensi investasi ini masih

¹⁰ Sadeq, A.H.M. *Economic Development in Islam*. (Petaling Jaya: Pelanduk Publication, 1988)
Siddiqui, M. N, "Banking Without Interest". (Leicester: The Islamic Foundation, 1983)

dapat dilakukan dengan memperoleh manfaat positif sampai MEC tidak menghasilkan apa-apa.

Perilaku ini tentu saja menunjukkan bahwa tindakan resiko dalam perekonomian islam cukup tinggi. Oleh karena itu, jumlah spekulasi yang dibuat dalam proyek dalam kerangka moneter berdasarkan pembagian manfaat atau tanpa premi lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah bunga dalam kerangka keuangan berdasarkan bunga. Meningkatnya tingkat investasi pasti akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan hasil dan pertumbuhan moneter serta pertumbuhan ekonomi.

Meskipun tingkat investasi yang lebih signifikan terjadi dalam kerangka keuangan sehubungan dengan pembagian keuntungan (tanpa bunga), penetapan aset dan arah pertumbuhan keuangan juga lebih produktif. Misalnya, bank atau lembaga moneter hanya akan memberikan uang muka atau dukungan usaha kepada pelaku bisnis yang memiliki nilai kredit atau kepercayaan yang tinggi, sambil juga mempertimbangkan tingkat pengembalian atau tingkat pengembalian normal selain premi atas modal yang dipinjamkan untuk mendanai perusahaan. tugas.

Hal ini dilakukan oleh lembaga keuangan dan perbankan karena semakin tinggi nilai kredit atau validitas pelaku usaha, maka semakin besar pula peluang bagi bank dan lembaga keuangan untuk mendapatkan kembali modal serta premi, tanpa memikirkan seberapa besarnya. kecepatan pengembalian adalah atau kecepatan pengembalian normal dari tugas. Bank tidak akan mendapatkan sebagian keuntungan dari usaha tersebut, betapapun besarnya keuntungan yang diperoleh, bank hanya akan mendapatkan pinjaman modal penting dan pendapatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Di sisi lain, bank dan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan pembagian manfaat akan memilih usaha yang memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan paling tinggi, dan tentunya juga mempertimbangkan validitas dan nilai kredit pelaku bisnis, dengan alasan manfaat (benefit) yang akan diperoleh oleh bank dan lembaga keuangan bebas premi erat kaitannya dengan efisiensi dan seberapa besar manfaat yang diperoleh dari usaha tersebut. Oleh karena itu, pasokan aset keuangan saat ini hanya diperuntukkan bagi kegiatan usaha dan tugas-tugas yang lebih

bermanfaat, sehingga berarti penjatahan aset keuangan juga lebih efisien. Perilaku seperti ini jelas berdampak baik terhadap perkembangan moneter.¹¹

Pelepasan bunga yang merupakan sebuah strategi dalam perekonomian yang berhubungan dengan uang sebenarnya mempunyai pengaruh yang baik terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan yang merupakan bagian besar dari pembangunan moneter, mengingat fakta bahwa pembangunan keuangan mungkin hanya menambah sedikit bantuan pemerintah kepada masyarakat, dengan asumsi Gaji dan kelimpahan yang didapat harus dinikmati dan dikumpulkan oleh oknum-oknum tertentu saja di hadapan publik. Sosialisasi yang setara dan pemberian gaji dan kelimpahan yang adil dapat berhasil dalam kerangka keuangan bebas premium, di mana tingkat keuntungan dari spekulasi yang dibuat disampaikan kepada mereka yang terlibat dalam praktik bisnis. Tingkat pengembalian manfaat atau tingkat pengembalian yang diharapkan yang diterima oleh bank dan pengusaha mungkin tidak sama dengan jumlah sebenarnya yang diperoleh, karena tingkat pengembalian rata-rata adalah perkiraan yang diharapkan di atas kertas yang didasarkan pada perkiraan yang telah ditentukan sebelumnya. proporsi pembagian manfaat. Dalam sistem penyebaran seperti itu, seorang visioner bisnis tidak bisa semakin boros dan boros, jika dalam bisnisnya ia mendapatkan keuntungan yang semakin besar. Hal ini dapat dibayangkan dalam kerangka keuangan dalam kaitannya dengan pendapatan, di mana seorang pebisnis hanya diharapkan untuk membayar biaya tetap dari aktivitas spekulasi sebagai pendapatan, tanpa mempedulikan seberapa besar keuntungan yang ia peroleh dari bisnisnya dan mengambil semua keuntungan yang diperolehnya. setelah membayar sejumlah uang penting yang telah ditetapkan sebelumnya kepada bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, cenderung beralasan bahwa sirkulasi gaji dan kelimpahan lebih setara dan adil dalam kerangka moneter yang bebas dari bunga dan berdasarkan pembagian keuntungan dibandingkan dalam kerangka finansial berdasarkan bunga.

Dampak dari perkembangan tersebut adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam pengaturan keuangan yang menjadikan pekerjaan yang diminati sebagai instrumen pendekatan yang berhubungan dengan uang dan sebagai biaya modal. Dampak ini dapat

¹¹ Uzair, M, "Central Banking Operations in Interest-Free Banking System", dalam Mohammad Ariff (ed). *Monetary and Fiscal Economics of Islam*". (Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics, 1982)

berhasil, terlepas dari apakah tidak ada langkah-langkah dinamis yang berfokus pada strategi pergantian peristiwa dan pembangunan moneter.

Dampak perkembangan keuangan yang timbul karena klasifikasi kedua dari strategi terkait uang adalah melalui melakukan aktivitas dinamis yang bertujuan menjadikan pembangunan dan pengembangan keuangan diasumsikan sebagai bagian dari instrumen yang berhubungan dengan uang. Meningkatkan tingkat pertumbuhan keuangan adalah tujuan mendasar dari strategi keuangan, dan hal ini dapat dicapai dengan menggunakan instrumen pendekatan keuangan. Dalam hal Bank Negara membutuhkan pengembangan keuangan, Bank Negara harus mewajibkan bank-bank usaha untuk memberikan manfaat yang lebih tinggi kepada pelaku usaha dengan mengubah proporsi manfaat yang lebih besar kepada pelaku usaha. Strategi ini akan meningkatkan investasi dari penggunaan aset keuangan bank. Selain itu, bank-bank pemerintah juga dapat meningkatkan jumlah kredit yang diberikan atau menyelesaikan pembangunan terkait uang dengan mengurangi kebutuhan simpanan, jumlah pinjaman, jumlah simpanan permintaan, dan meningkatkan jumlah negosiasi ulang. Karena pendekatan terkait uang di atas, bank akan meningkatkan pemanfaatan aset moneter mereka dengan memberikan konsesi kredit kepada klien dan visioner bisnis untuk melakukan spekulasi.¹²

Pelepasan bunga yang merupakan sebuah strategi dalam perekonomian yang berhubungan dengan uang sebenarnya mempunyai pengaruh yang baik terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan yang merupakan bagian besar dari pembangunan moneter, mengingat fakta bahwa pembangunan keuangan mungkin hanya menambah sedikit bantuan pemerintah kepada masyarakat, dengan asumsi Gaji dan kelimpahan yang didapat harus dinikmati dan dikumpulkan oleh oknum-oknum tertentu saja di hadapan publik. Sosialisasi yang setara dan pemberian gaji dan kelimpahan yang adil dapat berhasil dalam kerangka keuangan bebas premium, di mana tingkat keuntungan dari spekulasi yang dibuat disampaikan kepada mereka yang terlibat dalam praktik bisnis. Tingkat pengembalian manfaat atau tingkat pengembalian yang diharapkan yang diterima oleh bank dan pengusaha mungkin tidak sama dengan jumlah sebenarnya yang diperoleh, karena tingkat pengembalian rata-rata adalah perkiraan yang diharapkan di

¹² Ahmad, Kursyid. 1997. *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Risalah Gusti. Al-Raubae, Amer, and Safiq A. Alfi. 2005. "Strategi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkesinambungan Dalam Persepsi Islam." *Islamia* 5 (2).

atas kertas yang didasarkan pada perkiraan yang telah ditentukan sebelumnya. proporsi pembagian manfaat. Dalam sistem penyebaran seperti itu, seorang visioner bisnis tidak bisa semakin boros dan boros, jika dalam bisnisnya ia mendapatkan keuntungan yang semakin besar. Hal ini dapat dibayangkan dalam kerangka keuangan dalam kaitannya dengan pendapatan, di mana seorang pebisnis hanya diharapkan untuk membayar biaya tetap dari aktivitas spekulasi sebagai pendapatan, tanpa mempedulikan seberapa besar keuntungan yang ia peroleh dari bisnisnya dan mengambil semua keuntungan yang diperolehnya. setelah membayar sejumlah uang penting yang telah ditetapkan sebelumnya kepada bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, cenderung beralasan bahwa sirkulasi gaji dan kelimpahan lebih setara dan adil dalam kerangka moneter yang bebas dari bunga dan berdasarkan pembagian keuntungan dibandingkan dalam kerangka finansial berdasarkan bunga.

Dampak dari perkembangan tersebut adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam pengaturan keuangan yang menjadikan pekerjaan yang diminati sebagai instrumen pendekatan yang berhubungan dengan uang dan sebagai biaya modal. Dampak ini dapat berhasil, terlepas dari apakah tidak ada langkah-langkah dinamis yang berfokus pada strategi pergantian peristiwa dan pembangunan moneter.

Dampak perkembangan keuangan yang timbul karena klasifikasi kedua dari strategi terkait uang adalah melalui melakukan aktivitas dinamis yang bertujuan menjadikan pembangunan dan pengembangan keuangan diasumsikan sebagai bagian dari instrumen yang berhubungan dengan uang. Meningkatkan tingkat pertumbuhan keuangan adalah tujuan mendasar dari strategi keuangan, dan hal ini dapat dicapai dengan menggunakan instrumen pendekatan keuangan. Dalam hal Bank Negara membutuhkan pengembangan keuangan, Bank Negara harus mewajibkan bank-bank usaha untuk memberikan manfaat yang lebih tinggi kepada pelaku usaha dengan mengubah proporsi manfaat yang lebih besar kepada pelaku usaha. Strategi ini akan meningkatkan investasi dari penggunaan aset keuangan bank. Selain itu, bank-bank pemerintah juga dapat meningkatkan jumlah kredit yang diberikan atau menyelesaikan pembangunan terkait uang dengan mengurangi kebutuhan simpanan, jumlah pinjaman, jumlah simpanan permintaan, dan meningkatkan jumlah negosiasi ulang. Karena pendekatan terkait uang di atas, bank akan meningkatkan pemanfaatan aset moneter

mereka dengan memberikan konsesi kredit kepada klien dan visioner bisnis untuk melakukan spekulasi.¹³

Beberapa pakar keuangan Islam, termasuk penciptanya, berpendapat bahwa menjaga dengan ketat keandalan nilai uang tanpa mengizinkan ekspansi yang sangat kecil, adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, karena ekspansi kecil dapat berhasil dengan tujuan. perkembangan moneter dan kenaikan biaya diperbolehkan dalam masalah keuangan Islam. Keterlibatan nyata dalam dunia keuangan menunjukkan bahwa setiap perkembangan moneter sering kali diikuti oleh peningkatan biaya yang lebih tinggi dari biaya sebelumnya. Kenaikan biaya yang kecil atau biasa-biasa saja tidak bertentangan dengan standar moneter Islam. Jika kenaikan biaya tersebut bertentangan dengan keislaman dan menimbulkan rasa malu, tentu Nabi (saw) tidak mengizinkan kenaikan biaya tersebut. naik dengan hampir tidak ada kendali dari pemerintah dalam keadaan di mana tindakan pemberian kredit al-Qard al-Hasan terjadi di depan umum, serta tidak ada indeksasi yang diselesaikan untuk menghentikan ekspansi atau mengatasi apa yang disebut pelanggaran inflasi.

Barangsiapa memberi kredit berdasarkan standar al-Qard al-Hasan berarti ia memberi muka kepada Allah (swt), dan akan mendapat hadiah ganda (cicilan) dari Allah. Ini merupakan imbalan yang memadai untuk memberikan imbalan atas keterlambatan waktu (dalam penggunaan uang tunai yang telah dipinjamkan) dan untuk kemungkinan hilangnya nilai uang (yang disebabkan oleh ekspansi), dengan asumsi ekspansi terjadi. Kehilangan nilai uang tunai untuk situasi ini tidak berarti bahwa ketidakadilan telah terjadi, namun disebabkan oleh kekhasan normal dari cara berperilaku amal (mengutamakan kecenderungan orang lain untuk suatu tujuan) dalam memberikan kredit tunai dan melakukan penebusan dosa kepada carilah ridho Allah (swt).

Kekhasan al-Qard al-Hasan yang terjadi dan berlaku di kalangan masyarakat di ranah publik agak berbeda dengan yang terjadi di yayasan moneter dan dunia keuangan. Organisasi moneter dan perbankan merupakan lembaga perantara antara nasabah yang menyimpan uang dengan masyarakat yang menerima uang, dan hal ini memerlukan strategi yang hati-hati dalam menjalankan pembagian kredit sebagaimana al-Qard al-

¹³ Chapra, M. Umer. 1998. *Islam and The Economic Challenge*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Hasan. Ada sekitar dua jenis masalah dalam mengelola keanehan ini. Pertama, kontributor didekati untuk memberikan wewenang kepada bank untuk memberikan kredit pada tingkat bunga tertentu sesuai dengan standar al-Qard al-Hasan, untuk itu pedoman dalam alQard al-Hasan yang berlaku bagi masyarakat juga menerapkan sesuatu. Sama halnya dengan bank, khususnya bank tersebut bertindak dan bertindak sebagai spesialis bagi para kontributor yang memperoleh keuntungan dari uang yang mereka simpan di bank sebagai al-Qard al-Hasan, sehingga para kontributor juga harus menanggung pertaruhan kerugian dalam nilai tersebut. uang mereka. Kedua, Bank membuat pengaturan untuk memberikan simpanan tunai yang disisihkan dari keuntungan yang diperoleh, sebelum mengumumkan penggunaan keuntungan untuk membayar kerugian yang dialami investor. Jadi, ekspansi yang lembut dan terkendali diperbolehkan dalam aspek keuangan Islam dan tidak menyebabkan pengkhianatan moneter di mata publik, bahkan ekspansi yang lembut pun dapat bermanfaat bagi pembangunan keuangan.¹⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Jika semua hal dianggap sama maka penelitian ini mungkin ingin menekankan bahwa strategi keuangan saja tidak cukup bagi pemerintah untuk menyelesaikan arah moneter yang ideal, namun pemerintah harus menggunakan kedua perangkat pendekatan tersebut, khususnya pendekatan keuangan dan keuangan, dengan tujuan yang sama. tujuan akhir untuk mencapai ekspansi tenaga kerja dan produk yang tinggi dan stabil dalam jangka panjang. Kekayaan tenaga kerja dan produk dalam jangka panjang karena perluasan produksi merupakan sesuatu yang akan mendorong kesuksesan finansial di kancah publik. Oleh karena itu, kedua strategi yang berkaitan dengan keuangan dan keuangan harus saling melengkapi, untuk mencapai target utama dari kedua pengaturan tersebut, khususnya mencapai penciptaan tenaga kerja dan produk yang tinggi dan stabil dalam jangka panjang, guna meningkatkan gaji dan hasil.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad, Kursyid. 1997. *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Risalah
Gusti. Al-Raubae, Amer, and Safiq A. Alfi. 2005. "Strategi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkesinambungan Dalam Persepsi Islam." *Islamia* 5 (2).

¹⁴ Naqvi, Syed Nawab Haidar. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pertadireja, Ace. 1984. *Pengantar Ekonomika*. Yogyakarta: BPFPE.

- Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Boediono, *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis*. (Yogyakarta: BPFEE Yogyakarta, 1999).
- Chapra, M. Umer. 1998. *Islam and The Economic Challenge*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Naqvi, Syed Nawab Haidar. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pertadireja, Ace. 1984. *Pengantar Ekonomika*. Yogyakarta: BPFEE.
- Chapra. M. Umer, "Money and Banking in an Islamic Economics". Dalam Muhammad Ariff (ed.), *Monetary and Fiscal Economic of Islam*. (Jeddah Center for Research in Islamic Economics. 1982)
- Chapra. M. Umer, "Toward a Just Monetary System". (Leicester: The Islamic Foundation, 1985).
- Jhingan, M.L. *The Economics of Development and planning*. Ter. D. Guritno, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Mansur, Ahmad. *Potensi Tabungan, Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Dalam *Jurnal Keislaman Program Pasca Sarjana "AKADEMIKA" IAIN Sunan Ampel Surabaya*. Vol. 13, No. 1, September, 2003
- Roger L. Miller dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking*. (Singapore: McGraw-Hill. Inc., 1985)
- Sadeq, A.H.M. *Economic Development in Islam*. (Petaling Jaya: Pelanduk Publication, 1988)
- Sadeq, Abul Hasan Muhammad. 1991. *Economic Development in Islam*. Malaysia: Pelanduk Publication.
- Siddiqui, M. N, "Banking Without Interest". (Leicester: The Islamic Foundation, 1983)
- Sukirno, Sadono. 1999. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. 2nd ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Uzair. M, "Central Banking Operations in Interest-Free Banking System", dalam Mohammad Ariff (ed). *Monetary and Fiscal Economics of Islam*". (Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics, 1982)